



## **Negara, Politik dan Pendidikan Agama (Pendidikan Agama Dalam Sistem Pendidikan Nasional) dan Teori Globalisasi Dan Revolusi Modern Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Kebudayaan di Indonesia**

**Siti Mariyah<sup>1</sup>, Mariyamah Mariyamah<sup>2</sup>, Hariyun Sagita<sup>3</sup>, Satrio<sup>4</sup>, Lias Hasibuan<sup>5</sup>, Kasful Anwar<sup>6</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, email : [mardiaahmadmarya@yahoo.com](mailto:mardiaahmadmarya@yahoo.com)

<sup>2)</sup> Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, email : [maryamah.ama.pd@gmail.com](mailto:maryamah.ama.pd@gmail.com)

<sup>3)</sup> Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Dosen STAIN SAR Kepulauan Riau, email : [hariyunsagita@gmail.com](mailto:hariyunsagita@gmail.com)

<sup>4)</sup> Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Dosen STAIN SAR Kepulauan Riau, email : [satrioma056@gmail.com](mailto:satrioma056@gmail.com)

<sup>5)</sup> Dosen Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, email : [lhas10@yahoo.com](mailto:lhas10@yahoo.com)

<sup>6)</sup> Dosen Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, email : [kasfulanwarus@gmail.com](mailto:kasfulanwarus@gmail.com)

**Corresponding Author: Siti Mariyah<sup>1</sup>**

**Abstrak:** Negara, politik dan pendidikan merupakan tiga komponen penting, karena semuanya adalah bagian yang ikut mempengaruhi sistem kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Negara memiliki wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan yang melindungi potensi manusia dan alam serta pemberdayaannya. Sedangkan politik adalah sistem ketatanegaraan yang disepakati untuk menghantarkan bangsa menuju cita-cita seluruh rakyatnya, dan suatu sistem yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah proses kulturisasi agar lebih maju, dan proses pengembangan potensi manusia sesuai bakat dan minat untuk memperkuat dukungan terhadap penggalan sumber daya alam menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang dicita-citakan. Globalisasi dipandang sebagai kekuatan yang tidak tertahankan serta jinak untuk memberikan kemakmuran ekonomi kepada orang-orang di seluruh dunia. Di sisi lain, ia dituding sebagai sumber dari segala penyakit kontemporer yang mematenkan identitas budaya setiap bangsa.

Dua sisi berbeda yang melekat pada globalisasi ini menjadi perhatian serius berbagai bangsa dalam mempertahankan karakter budayanya melalui dunia pendidikan.

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama, Sistem Pendidikan Nasional, Globalisasi, Revolusi Modern, Perspektif Pendidikan Islam, Kebudayaan di Indonesia

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ditilik dari sejarah masa silam, Perintah kolonial terhadap pendidikan agama sangat sarat akan kepentingan politik. Kolonial sadar bahwa pendidikan agama menanamkan sikap-sikap yang mengancam kekuasaan pemerintah kolonial. Oleh karenanya, berbagai kebijakan dari kolonial ini dibuat agar pendidikan agama tidak berkembang. Agama (khususnya Islam) tidak memberikan konsep negara secara detail. Oleh karenanya, berbagai kajian mengenai hubungan antara negara dan agama masih berlangsung sampai abad modern. Berbagai kajian ini membentuk 3 golongan, yaitu golongan yang berpendapat bahwa negara dan agama adalah dua hal yang terpisah, golongan yang berpendapat sebaliknya yaitu negara dan agama adalah dua hal yang saling berkaitan erat, serta golongan ketika yang mencoba berada di titik tengah antar keduanya

Persoalan pendidikan merupakan persoalan yang tidak pernah berhenti dibincangkan, sebab pendidikan erat kaitannya dengan persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi dirinya. Pendidikan juga bisa dikatakan suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dalam proses mencapai tujuannya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi.

Dalam kaitannya dengan nilai kebangsaan, pendidikan diartikan sebagai perjuangan bangsa, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa tujuan akhir pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya atau yang dalam bahasa agamanya disebut *insan kamil*, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berkenaan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian. Karena itu dalam undang-undang sisdiknas Tahun 2003, pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional?
2. Bagaimana teori globalisasi dan revolusi modern dalam perspektif pendidikan Islam dan kebudayaan di Indonesia ?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kajian pustaka (library research). Memaparkan dan mengkaji teori yang dikutip melalui buku-buku

dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan. Dalam penelitian kualitatif kajian pustaka digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis, yaitu harus digunakan secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian pendidikan, pendidikan agama dan pendidikan nasional

#### a) Pengertian Pendidikan

Ahmad D. Marimba memaknai pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>1</sup> Marimba pun merumuskan lima unsur utama dalam pendidikan, yaitu; 1) Usaha yang bersifat bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar. 2) Ada pendidik, pembimbing atau penolong. 3) Ada yang di didik atau peserta didik. 4) Adanya dasar atau tujuan dalam bimbingan tersebut. 5) Adanya alat yang digunakan dalam usaha tersebut.

Soeganda Poerbakawatja lebih umum mengartikan pendidikan sebagai upaya dan perbuatan generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Sedangkan Abuddin Nata menyimpulkan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan menyampaikannya kepada siswa secara bertahap.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan pendidikan nasional, seperti pendapat Ki Hajar Dewantoro, yang disunting oleh Abuddin Nata, sudah bisa mewakili. Ia berpendapat bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan prikehidupan yang dapat mengangkat derajat Negara dan rakyatnya agar dapat bekerjasama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di muka bumi.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, Ki Hajar menyoroti pendidikan sebagai upaya memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan. Pendidikan menurutnya adalah usaha kebudayaan berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al Mujadalah ayat 11 yang artinya : “ *Wahai orang-orang yang beriman . apabila dikatakan kepadamu, “ Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu, “maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”*”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan imbalan sesuai dengan usaha dan kerja keras dari hambaNya. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

---

1 Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, hlm.166

2 Soeganda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970, hlm. 11.

3 Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001. hlm. 10.

4 Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004. hlm.130.

5 Kemenag RI, AlQur'an dan Terjemah, Tajwid Kode Tafsir perkata

Sementara dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai pun disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia, yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas). Dalam salah satu bab diterangkan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### **b) Pendidikan Agama**

Pendidikan agama atau keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan agama sebagaimana penjelasan Zakiyah Darajat, dalam hal ini agama Islam, adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.<sup>6</sup> Muhammad Qutb, sebagaimana dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto, memaknai pendidikan Islam sebagai usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini.<sup>7</sup> Jadi tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembentukkan tingkah laku islami (*akhlak mulia*) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Dengan kata lain tujuan akhir pendidikan Islam terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya.

### **c) Gambaran Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia**

Ketika kita membicarakan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri.

Pada awal perkembangan islam di Indonesia, pendidikan agama diberikan dalam bentuk informal. Para pembawa Islam, yaitu saudagar dari Gujarat, menyiarkan dan memberi pendidikan agama melalui orang-orang yang membeli dagangannya. Pendidikan yang diberikan lebih mengutamakan melalui contoh teladan. Mereka berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus iklas, amanah, jujur, adil serta pemurah. Dengan demikian, banyak masyarakat yang tertarik dan mengikutinya.

Setelah tersebarnya Islam melalui pendidikan informal ini, pendidikan islam sudah mulai mencari lahan khusus sebagai tempat pendidikan. Surau, langgar atau mushalla dan masjid adalah tempat memberikan pengajaran diluar pendidikan keluarga. Tujuan para pendidik hanya untuk bisa memberikan ilmunya kepada peserta didik tanpa ada imbalan apapun. Pendidikan diberikan dengan sangat sederhana dan inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren dan pendidikan islam yang formal dalam bentuk madrasah.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan islam juga mengalami perubahan. Pendidikan islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Tentunya perubahan ini juga

---

<sup>6</sup> Zakiah daradajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 28.

<sup>7</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 47

berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan islam itu sendiri, yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu-ilmu pokok agama meningkat kepada kajian ilmu yang lain.

Usaha pembaharuan pendidikan islam dapat kita lihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid, mushalla kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem klasikal mulai diterapkan. Bangku, meja dan papan tulis mulai digunakan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama islam.

Madrasah Adabiyah di Padang merupakan contoh evolusi pendidikan islam, dari tradisional ke modern. Madrasah Adabiyah, didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada 1909, merupakan pendidikan islam pertama kali di Indonesia yang menerapkan sistem klasikal lengkap dengan sarana dan prasarananya. Selain ilmu agama, Al-qur'an sebagai pelajaran wajib, juga diajarkan pengetahuan umum.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya madrasah terbagi atas *madrasah diniyah*, khusus mengajarkan ilmu agama, dan madrasah umum yang juga memasukkan ilmu umum di samping ilmu agama. Untuk tingkat dasar disebut *madrasah ibtida'iyah*, tingkat menengah disebut *madrasah tsanawiyah*, dan tingkat menengah atas disebut *madrasah aliyah*.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan dan pengajaran agama islam, maka muncul pula lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan seperti SD Islam, SMP Islam, SMA Islam dan bahkan pendidikan agama juga telah masuk dalam kurikulum pendidikan umum negeri.

#### **d) Posisi Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Azyumardi Azra, 1995: 55 mengungkapkan pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan ketrampilan dengan tujuan menyiapkan manusia untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Namun hal itu tidak berjalan dengan lurus, karena pendidikan Islam dipengaruhi oleh arus globalisasi yang terjadi saat ini. Globalisasi merupakan ancaman besar bagi pendidikan Islam untuk mempertahankan nilai-nilai agama yang murni. Pendidikan Islam dizaman ini menghadapi tantangan-tantangan yang serius untuk tetap eksis di dunia pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari hilangnya batas-batas ruang dan waktu antara satu negara dengan negara yang lain sebagai dampak dari globalisasi.

Undang-undang sistem pendidikan nasional no.20 tahun 2003 bab I tentang ketentuan umum menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional dalam sisdiknas adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>9</sup> *Undang-undang sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 2 tentang dasar fungsi dan tujuan.*

Dari pengertian pendidikan, pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, sangat kental nuansa nilai-nilai agamanya. Pada beberapa bab lainnya juga sangat tampak bahwa kata agama dan nilai-nilai agama kerap mengikutinya. Misalnya, dalam bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Begitupula dalam bab IX tentang kurikulum, bahwa dalam penyusunannya diantaranya harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta peningkatan ahlak mulia.

Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Jika hal tersebut dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia Indonesia dan menjadi dasar kepribadian, maka manusia Indonesia akan menjadi manusia yang **paripurna** atau **insan kamil**. Dengan dasar inilah agama menjadi bagian terpenting dari pendidikan nasional yang berkenaan dengan aspek pembinaan sikap, moral, kepribadian dan nilai-nilai ahlakul karimah.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Mastuhu mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai **suplemen** dan **komplemen** bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia yang modern dengan tetap berwajah iman dan takwa.<sup>10</sup>

Tidak jauh beda dengan pendapat Mastuhu, guru besar Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, DR. Ahmadi yang dikutip oleh Endin Surya Solehudin, menyebutkan bahwa implikasi dari pemaknaan pendidikan Islam adalah reposisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Mengenai reposisi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional, Ahmadi mengemukakan tiga alasan, *pertama*, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Tauhid); *kedua*, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk jasmani-rohani yang berpotensi untuk menjadi manusia bermartabat (makhluk paling mulia); *ketiga*, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi (fitrah dan sumber daya manusia) menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur (akhlak mulia), dan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada posisi konsep. Ditinjau dari tataran universalitas konsep Pendidikan Islam lebih universal karena tidak dibatasi negara dan bangsa, tetapi ditinjau dari posisinya dalam konteks nasional, konsep pendidikan Islam menjadi subsistem pendidikan nasional. Karena posisinya sebagai subsistem, kadangkala dalam penyelenggaraan pendidikan hanya diposisikan sebagai suplemen. Mengingat bahwa secara filosofis (ontologis dan aksiologis) pendidikan Islam relevan dan merupakan bagian

---

10 Abudin Nata. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. hlm.291.

11 <http://niendin.wordpress.com/2008/01/13/merombak-pendidikan-agama-islam>

integral dari sistem pendidikan nasional, bahkan secara sosiologis pendidikan Islam merupakan aset nasional, maka posisi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional bukan sekadar berfungsi sebagai suplemen, tetapi sebagai komponen substansial. Artinya, pendidikan Islam merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional.

Terlepas dari nilai-nilai agama yang menjadi dasar dari pendidikan nasional, pendidikan agama sempat menjadi masalah ketika masuk dalam sistem pendidikan nasional. Persoalan yang diperdebatkan adalah posisi pendidikan agama tertentu dalam lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki latar belakang pemihakan pada agama tertentu. Misalnya, pada lembaga pendidikan muslim terdapat siswa yang bukan muslim, mungkinkah bisa diajarkan pendidikan agama lain pada lembaga tersebut dan atau sebaliknya.<sup>12</sup>

Persoalan ini sempat menyeruak ketika terjadi pengesahan undang-undang sisdiknas no. 20 tahun 2003. Meski demikian, perdebatan yang menimbulkan pro-kontra tersebut dapat terselesaikan dengan cara yang lebih demokratis, realistik dan sesuai dengan kebebasan serta upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## **GLOBALISASI DAN REVOLUSI MODERN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA**

Kata globalisasi sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris "Globalization" ( Theodore Levitte: 1985). Globalisasi adalah proses integrasi nasional yang terjadi karena pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek kebudayaan lainnya. Fenomena yang muncul karena berbagai faktor, mmulai dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perdagangan bebas, kemudahan orang-orang untuk bermigrasi dari negara satu ke negara lainnya, kerja sama politik antar negara, hingga cara berfikir masyarakat yang semakin maju.

Menurut Mastuhu, turbulensi arus global bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontras moralitas, yakni pertentangan dua sisi moral secara diametral, seperti guru mendidik disiplin lalu lintas, namun di jalan para sopir ugal-ugalan, di sekolah dikampanyekan gerakan anti narkoba tapi penjaja narkoba di masyarakat kian merajalela dan bahkan sering terjadi bentrok antarkampung, di sekolah diadakan razia pornografi tapi media massa terus memajang simbol-simbol yang merangsang nafsu syahwat. Contoh arus global di atas dapat membawa paradoks bagi praktis pendidikan Islam, seperti terjadi kontra moralitas antara yang diidealkan dalam pendidikan Islam (*das solen*) dengan realitas di lapang (*das sein*) maka gerakan tajdid dalam pendidikan Islam hendaknya melihat kenyataan kehidupan masyarakat lebih dahulu. Mastuhu berpendapat bahwa menutup diri atau bersikap eksklusif akan ketinggalan zaman, sedangkan bersikap membuka diri berisiko kehilangan jati diri atau kepribadian.<sup>13</sup>

Globalisasi, menurut Anthony Giddens sebagai proses yang berjalan dengan kecepatan tinggi yang tidak seorang pun dapat mengendalikannya. Globalisasi kata Giddens, merupakan dunia yang lepas kendali (*Runaway word*) Ibarat sebuah truk besar (*Juggernaut*) yang meluncur tanpa kendali dan tidak seorang pun dapat menahan laju truk besar yang bernama globalisasi ini. (Anthony Giddens, 1999: 19)

Era globalisasi dicirikan dengan: Pertama, abad ini adalah abad yang mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai handalan manusia untuk memecahkan problem kehidupannya,

---

12 Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 12 ayat 1a tentang peserta didik, "*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*".

13 Lihat Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi Kasus dan Konsep (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h.11

dengan demikian abad ini akan melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Keunggulan manusia atau suatu bangsa akan dikaitkan dengan keunggulan bangsa tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan. Kedua, di era ini muncul dunia tanpa batas (*borderless world*). Sekat-sekat geografis menjadi semu sebagai akibat dari kemajuan ilmu komunikasi dan informasi. Peristiwa apapun yang terjadi di suatu belahan dunia dalam waktu yang hampir bersamaan akan diketahui di belahan dunia lainnya, maka terjadilah pertukaran informasi secara mudah. Ketiga, era ini akan memunculkan persaingan global, akan muncul era kompetitif. Untuk menyaingi era kompetitif ini, maka memiliki keunggulan menjadi sebuah keniscayaan. (Haidar Putra Daulay, 2015: 13).

Menyikapi globalisasi, ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam, setidaknya ada tiga kelompok yang menyatakan sikapnya terhadap globalisasi. Kelompok pertama, para globalis, mereka meyakini bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negaranegara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Kenyataan para globalis ini akan sangat berdampak bagi hubungan sosial masyarakat ditingkat lokal yang secara alamiah akan terhegemoni oleh arus budaya barat yang cenderung lebih kuat dan berbeda dengan tradisi ketimuran. Perubahan yang berlangsung secara cepat dan drastis menyebabkan banyak orang gagal menyesuaikan diri. Akibatnya, muncullah berbagai bentuk kekerasan sosial yang dapat mempergunakan simbol-simbol kemanusiaan, politik, ekonomi bahkan juga simbol keagamaan. Kelompok kedua, pihak yang acuh, sekaligus menolak konsep globalisasi mereka yang biasa disebut sebagai "kaum tradisional". Kaum tradisional tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah terjadi saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Mereka menganggap bahwa globalisasi akan merusak sendi-sendi budaya Islam yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Kekhawatiran mereka terletak pada "westernisasi" dan pembaratan pada budaya setempat melalui arus globalisasi, pelemahan kedaulatan nasional, akan tergerus oleh kekuatan super power, hilangnya identitas budaya nasional dan timbulnya eksploitasi terhadap negara berkembang.

Kelompok ketiga, adalah kelompok pertengahan yakni yang menyikapinya secara proporsional, menurut Yusuf al-Qardhawi, inilah sikap yang baik sebagai cermin sebagai manhaj Islam pertengahan. Dengan melihat ketiga sikap di atas dapat dimengerti bahwa globalisasi harus dimaknai secara benar dan proporsional terutama menyangkut pendidikan Islam. Salah satu bentuk globalisasi dapat diamati dengan adanya perdagangan bebas dalam berbagai lini sosial, tidak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan seperti tidak lagi murni mengusung misi transfer keilmuan serta penanaman etika kepada peserta didik, namun mengalami perluasan fungsi sebagai alat strategis dalam meraup keuntungan (*profit oriented*) dengan menawarkan sistem mutakhir dengan biaya pendidikan yang cukup mahal.

(Arif Shaifudin, 2016: 3) memaparkan bahwa Globalisasi merupakan sebuah fenomena kompleks dan efek domino atas laju modernitas yang memiliki efek luas terhadap semua dimensi kehidupan umat manusia. Tidak mengherankan, jika istilah, "globalisasi" ini telah memperoleh konotasi arti yang cukup banyak. Di satu sisi, globalisasi dipandang sebagai kekuatan yang tidak tertahankan serta jinak untuk memberikan kemakmuran ekonomi kepada orang-orang di seluruh dunia. Di sisi lain, ia dituding sebagai sumber dari segala penyakit kontemporer yang mematikan identitas budaya setiap bangsa. Dua sisi berbeda yang melekat pada globalisasi ini menjadi perhatian serius berbagai bangsa dalam mempertahankan karakter budayanya melalui dunia pendidikan.

Dampak globalisasi dalam sistem pendidikan adalah terintegrasinya aspek pendidikan dan ekonomi. Ekspansi besar-besaran teknologi dalam sistem pendidikan merupakan salah satu wujud integrasi ekonomi dalam dunia pendidikan. Indikator kualitas sistem pendidikan juga banyak menggunakan indikator ekonomi, ketika sekolah misalnya harus mengintegrasikan kepentingan pengguna (pelanggan-dalam bahasa ekonomi) dengan proses pembelajaran di sekolah. *Output* lembaga pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini mengindikasikan bahwa orientasi kepada kepentingan pasar semakin menguat. Gejala sosial ini semakin diperparah dengan berkembangnya neoliberalisme di berbagai negara. Dalam kendali neoliberalisme, sekolah harus memiliki mekanisme untuk dapat tetap *survive*. Mekanisme yang digunakan antara lain melalui komersialisasi dan marketisasi. Melalui kedua mekanisme ini, sekolah diharapkan mampu mendapatkan keuntungan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat umum. Marketisasi pendidikan memberikan peluang pada setiap sekolah untuk melakukan persaingan secara terbuka yang merupakan ciri utama neoliberalisme. Prinsip kerja lembaga pendidikan mengikuti pola pasar: ada permintaan dan ada penawaran. Pada akhirnya, sekolah diposisikan sebagai sebuah komoditas. Di Indonesia, gejala marketisasi dilihat dari sistem peragaman tipe sekolah. Sejumlah sekolah yang menawarkan tipe untuk mendapatkan perhatian siswa, di antaranya: tipe bilingual, sekolah internasional, sekolah unggulan, serta “sekolah favorit” di kalangan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu pemerintah juga merintis pengembangan sekolah berstandar internasional (RSBI-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan berstandar nasional (RSBN- Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional) di sejumlah wilayah tanah air. Namun, awal 2012 tipe sekolah tersebut dihapus karena dianggap telah menyebabkan ketimpangan sosial. Hal ini disebabkan keberadaan tipe-tipe sekolah tersebut telah melahirkan perbedaan kesempatan belajar bagi si kaya dan si miskin.

Sejak lahirnya Revolusi Industri di Eropa, peranan pendidikan dalam masyarakat semakin meningkat. Ia menjadi salah satu institusi penting dalam sistem sosial masyarakat modern yang berbasis industri. Emile Durkheim memaparkan sebagaimana di kutip dalam Nanang Martono menyatakan bahwa dalam sistem masyarakat industri, pendidikan memiliki peran dan fungsi menopang keberlangsungan kegiatan industri di masyarakat. Menurutnya, pendidikan berperan untuk membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. (Nanang Martono, 2014).

Perubahan pada dunia yang kini tengah memasuki era revolusi industri 5.0 atau revolusi industri dunia kelima atau era disrupsi. (Rhenald Kasali, 2017: 149) dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Sebuah era baru yang menekankan pada pola digital *economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Segala hal menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pendidikan tinggi. Menristekdikti pada Pembukaan acara Rakernas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) Tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan oleh Kemenristekdikti untuk mendorong di era Revolusi Industri 5.0, yaitu;

- a) Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology (IT)*, *Operational Technology (OT)*, *Internet of Things*

- (IoT), dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data *literacy, technological literacy and human literacy*.
- b) Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 5.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan *distance learning*, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber University ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
  - c) Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.
  - d) Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 5.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Industri, dan Masyarakat.
  - e) Terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempersiapkan dan memetakan angkatan kerja dari lulusan pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 5.0. Dunia kerja di era revolusi industri 5.0. merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini produksi di dunia industri yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Karakteristik revolusi industri 5.0 ini meliputi digitalisasi, optimalisasi dan kustomisasi produksi, otomasi dan adaptasi, *human machine interaction, value added services and businesses, automatic data exchange and communication*, dan penggunaan teknologi internet

Pola industri baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan. Industri yang akan banyak berkembang pada revolusi industri baru ini. Tantangan tersebut meniscayakan kebijakan antisipatif melalui transformasi pasar kerja Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan iklim bisnis dan industri, perubahan jabatan dan kebutuhan ketrampilan. Salah satu faktor yang penting adalah ketrampilan dan kompetensi yang harus tetap secara konsisten perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pasar kerja yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, dunia pendidikan dan dunia Industri perlu mengembangkan Industrial transformation strategy dengan mempertimbangkan perkembangan sektor ketenagakerjaan karena transformasi industri akan berhasil dengan adanya tenaga kerja yang kompeten. Berbicara masalah peningkatan kualitas SDM Indonesia, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah kualitas SDM. Yaitu bagaimana memastikan agar kualitas dari SDM Indonesia ini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sesuai dengan industri yang berbasis teknologi digital. Yang kedua, adalah masalah kuantitas pekerja atau SDM yang berkualitas dan kompeten serta sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga lokasi yaitu masih kurang meratanya sebaran SDM yang berkualitas terutama di daerah-daerah. Terkait dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pemerintah selaku regulator menekankan pentingnya masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi yang sedang dilakukan pemerintah melalui pelatihan kerja di BLK dan program pemagangan.

Hadirnya *e-learning* telah memberi nuansa baru dan telah memfasilitasi perubahan pada era ini. Secara umum, *e-learning* dapat digambarkan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat disampaikan melalui berbagai media elektronik seperti internet, intranet, extranet, satelit, audio, TV interaktif dan CD ROM. *E-learning* telah mendorong demokratisasi pengajaran dan proses pembelajaran dengan memberikan kendali yang lebih besar dalam pembelajaran kepada murid. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip penyelenggaraan

pendidikan nasional seperti termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” · Secara umum, intervensi e-learning dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua: komplementer dan substitusi. Yang pertama mengandaikan bahwa cara pembelajaran dengan pertemuan tatap-muka masih berjalan tetapi ditambah dengan model interaksi berbantuan TI, sedang yang kedua sebagian besar proses pembelajaran dilakukan berbantuan TI. Saat ini, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga telah memfasilitasi pemanfaatan *e-learning* sebagai substitusi proses pembelajaran konvensional. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107/U/2001 dengan jelas membuka koridor untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh di mana *e-learning* dapat masuk memainkan peran. Tantangan berikutnya terkait dampak bergulirnya revolusi industri 4.0 adalah wacana tentang kehadiran Perguruan Tinggi Asing di Indonesia telah memantik riuhnya perdebatan dalam dunia pendidikan kontemporer. Kebijakan pemerintah tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang memang membuka pintu bagi kampus asing untuk beroperasi di Indonesia, seperti diatur dalam pasal 90 ayat (1). Bahwa “Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah melalui UU tersebut, membuka pintu lebar masuknya perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia. Langkah pemerintah itu menimbulkan polemik hebat. Pro dan kontra mencuat tanpa ruang lingkup yang jelas. Itu terjadi karena tujuan pemerintah membuka cabang PTA belum terdefinisi detail. Pemerintah baru sebatas menyatakan, PTA hanya akan membuka program studi yang terkait *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM). Itu pun belum disertai karakteristik STEM seperti apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, upaya menghadirkan negara lain dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Jangan sampai kehadiran PT asing hanya menambah kesenjangan antara kelompok terdidik dan tidak terdidik. Hal yang harus dihindari adalah PT asing tidak boleh menjadikan Indonesia sebagai tempat ekspansi bisnis semata yang tidak menghiraukan nilai-nilai luhur tri dharma perguruan tinggi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pembentukan kepribadian yang utama tentunya tidak terlepas dari peran pendidikan agama. Oleh karena itu pendidikan agama menempati posisi yang penting dalam lingkup sistem pendidikan nasional.

Perubahan sosial secara garis besar merupakan suatu perubahan pola kelakuan, hubungan sosial, institusi-institusi dan struktur sosial dalam waktu tertentu dan perubahan selalu mengalami sebuah kapasitas. Di antara bentuk globalisasi dapat diamati dengan adanya perdagangan bebas dan revolusi industri dalam berbagai lini sosial, tidak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan seperti tidak lagi murni mengusung misi transfer keilmuan serta penanaman etika kepada peserta didik, namun mengalami perluasan fungsi sebagai alat strategis dalam meraup keuntungan (*profit oriented*).

### **Saran**

Sebagai pendidik sebaiknya kita tetap memegang teguh nilai-nilai pendidikan keagamaan dalam melaksanakan tugas utama mendidik, namun sebagai individu yang hidup

di dalam lingkungan masyarakat sosial, ada baiknya kita juga menerima pembaharuan dengan terlebih dahulu memfilter terhadap setiap perkembangan/pembaharuan yang ada.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

\_\_\_\_\_, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

[Http://niendin.wordpress.com/2008/01/13/merombak-pendidikan-agama-islam](http://niendin.wordpress.com/2008/01/13/merombak-pendidikan-agama-islam)

Soeganda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970.

Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 12 ayat 1a tentang peserta didik, “*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*”.

Zakiah daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.